



## Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak: Sanksi Pajak Sebagai Faktor Potensial

Teguh Erawati<sup>1</sup>, Putri Karina Sio<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta

\*E-mail Korespondensi: putrikarinasio2@mail.com

### Information Article

History Article

Submission: 02-12-2025

Revision: 26-12-2025

Published: 04-01-2026

### DOI Article:

10.24905/permana.v17i3.1328

### A B S T R A K

Pandangan moral dan hukum seseorang terkait praktik tidak bermoral dalam mengurangi tanggung jawab pajak membentuk sudut pandang mereka terhadap penggelapan pajak. Prevalensi kasus korupsi di sektor perpajakan serta fakta yakni realisasi pendapatan pajak secara rutin kurang dari target menginspirasi riset ini. Tujuan riset ini ialah untuk mengamati bagaimana pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak berubah setelah mereka terpapar berbagai tingkat keahlian pajak, Machiavellianisme, dan sanksi pajak. Riset berikut mempergunakan teknik kurangtitatif dan mengumpulkan data primer dari 100 mahasiswa akuntansi di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa mempergunakan kuesioner sampel selektif. Sanksi pajak terbukti berimplikasi positif kepada pandangan terkait penggelapan pajak, berbeda dengan keahlian pajak dan kecenderungan Machiavellian, yang ditemukan tidak memiliki dampak. Temuan riset ini menyoroti pentingnya otoritas pajak mempergunakan penegakan hukuman sebagai prinsip panduan untuk memperkuat hukum demi kepentingan pendidikan. Penggunaan partisipan mahasiswa, yang mungkin tidak punya pemahaman yang kuat tentang sistem hukuman pajak di dunia nyata, merupakan potensi kelemahan riset ini. Otoritas pajak dapat mempergunakan hasil ini untuk memperkuat kebijakan penegakan hukum mereka dan mempergunakannya sebagai alat pembelajaran.

**Kata Kunci:** Persepsi, Pemahaman Perpajakan, Machiavellian, Sanksi Pajak, Penggelapan Pajak

### A B S T R A C T

*A person's moral and legal views on the immoral practice of lowering tax responsibilities make up their tax evasion viewpoint. The prevalence of corruption cases within the taxation sector and the fact that tax revenue realizations routinely fall short of goals inspire this study. The purpose of this research was to look at how students' views on tax evasion changed after they were exposed to different levels of tax expertise, Machiavellianism, and tax*

### Acknowledgment

2549



---

*penalties. The study used a quantitative technique and gathered primary data from 100 accounting students at Sarjanawiyata Tamansiswa University using a selective sample questionnaire. Tax punishments were shown to positively affect views of tax evasion, in contrast to tax expertise and Machiavellian tendencies, which were found to have no impact. The findings of this study highlight the value of tax authorities using punishment enforcement as a guiding principle to fortify legal laws in the interest of education. Using student participants, who may not have a solid grasp of the real-world tax punishment system, is a potential weakness of this research. The tax authorities might use these results to reinforce their policies on law enforcement and use them as a teaching tool.*

**Key word:** *Perceptions; Tax Knowledge; Machiavellian, Tax Sanction; Tax evasion*

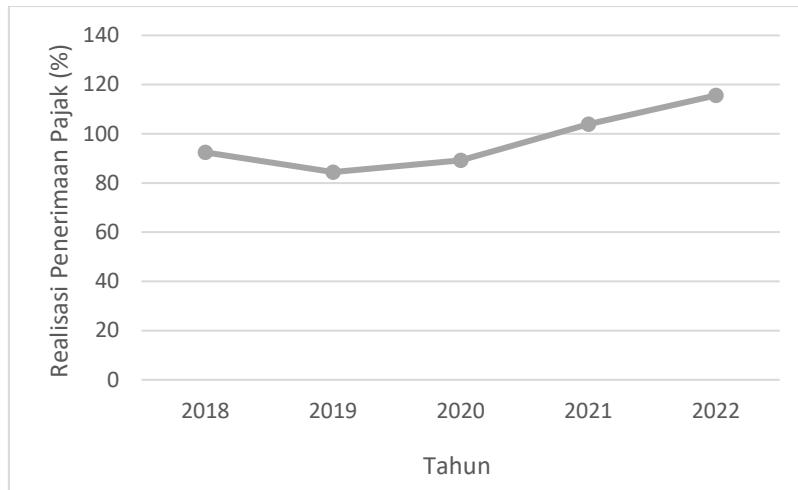
---

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

## PENDAHULUAN

Ketersediaan sumber daya keuangan merupakan persyaratan mendasar agar suatu negara dapat berfungsi dengan baik dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Mengenai hal ini, pajak sangat penting karena memberikan aliran pendapatan yang stabil bagi negara dan menjamin keberlanjutan pendanaan publik. Pajak didefinisikan sebagai "kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau entitas, yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipergunakan untuk kepentingan umum, dan bukan dalam bentuk kompensasi langsung" (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak ialah sumber penenerimaan utama negara yang memberikan kontribusi terbesar sumber penerimaan lainnya (Auliana & Muttaqin, 2023). Berlandaskan definisi pajak, banyak orang yang menganggapnya sebagai penghalang yang mengurangi finansial atau pendapatan individu dan organisasi. Ketika orang mengamati pajak sebagai beban yang tidak perlu, mereka mungkin menghindari pembayarannya, yang mungkin berupa strategi legal seperti perencanaan pajak atau strategi kriminal seperti penggelapan pajak.

Masalah penggelapan pajak di Indonesia terus menjadi tantangan signifikan bagi otoritas fiskal. Nilai realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2020 masing-masing hanya mencapai 92,41%, 84,44%, dan 89,25%, mencerminkan kesenjangan pajak yang cukup besar akibat ketidakpatuhan. Fenomena ini dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:



**Gambar 1. Grafik Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (2018-2022)**

Sumber: kemenkeu.go.id (2022)

Meskipun ada pola peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, risiko aktivitas penggelapan pajak tetap ada, seperti yang disoroti oleh berbagai kasus hukum yang muncul. Misalnya, kasus penggelapan pajak tahun 2022 yang melibatkan PT PR menyebabkan kerugian negara sejumlah Rp 292 miliar, bersama dengan kasus ET dan PT TMR pada tahun 2023 yang menjadi bukti nyata yakni upaya menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya masih marak dilaksanakan untuk menghindari dari tanggung jawab pajak.

Tingginya kasus penggelapan pajak turut membentuk persepsi negatif di kalangan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Karlina (2020) menyatakan yakni persepsi ialah tahapan di mana individu memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasi rangsangan yang diterima dari lingkungan. Sudut pandang pengamat memengaruhi keakuratan persepsi mereka. Secara teoritis, studi ini dilandaskan kepada Teori Perilaku Terencana (TPB) Ajzen, yang menyatakan yakni sikap, standar subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan memengaruhi tindakan individu seperti kepatuhan pajak (Fitria & Wahyudi, 2022). Dalam konteks ini, persepsi individu terkait penggelapan pajak sangat penting karena memengaruhi tindakan di masa depan ketika berperan sebagai wajib pajak. Mahasiswa akuntansi ialah fokus penting untuk riset ini karena nilai-nilai etika dan pengetahuan yang dimiliki saat ini akan memengaruhi integritas karier masa depan sebagai profesional di bidang perpajakan.

Beberapa faktor potensial yang diduga memengaruhi persepsi penggelapan pajak meliputi pemahaman perpajakan, machiavellian, dan sanksi pajak. Pendapat Aji et al. (2021), sebagai WP maka wajib paham akan hak, tanggung jawab, serta potensi jebakan agar punya pema-

2551



haman yang baik tentang sistem pajak. Penggelapan pajak akan berkurang ketika orang punya pemahaman yang lebih baik terkait sistem pajak. Sebaliknya, semakin rendah pemahaman seseorang akan meningkatkan praktik penggelapan pajak. Pemahaman yang baik mampu menanamkan sikap patuh dan mendorong kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Temuan Sinaga et al. (2021); Sari et al. (2023) mengungkapkan pemahaman perpajakan memengaruhi persepsi dan kecenderungan individu kepada praktik penggelapan pajak.

Faktor kedua mencakup kepribadian seperti machiavellian yang memiliki karakteristik manipulatif dan cenderung menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi, yang mendorong perilaku non-ethis. Menurut Zainuddin et al. (2021), machiavellian ialah kecenderungan untuk memanipulasi dan melanggar hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti penggelapan pajak tanpa memikirkan risiko yang dapat mengakibatkan sanksi administratif atau pidana. Seseorang yang punya tingkat machiavellian tinggi cenderung lebih permisif terkait penggelapan pajak, sementara seseorang yang machiavelliannya rendah mengamati penggelapan pajak sebagai tindakan yang tidak bermoral. Menurut Tulalessy & Loupatty (2023) machiavellian mendorong perilaku tidak jujur dalam pajak. Sejumlah penelitian memperlihatkan tingginya machiavellian memengaruhi kepada persepsi terkait penggelapan pajak (Lestari & Sofie, 2023; Wardani & Baity, 2024). Berbeda dengan temuan Fertiawan et al. (2023) justru mengungkapkan tidak adanya pengaruh signifikan.

Sanksi pajak juga merupakan faktor potensial yang memengaruhi persepsi terkait penggelapan pajak, karena berperan sebagai kontrol eksternal yang diharapkan memberikan efek jera dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurut penelitian Sundari (2019), sanksi pajak didefinisikan sebagai bentuk hukuman yang dikenai pada WP atas pelanggaran yang dilaksanakan dalam bidang perpajakan. Sanksi ini dimaksudkan untuk menjamin yakni peraturan perpajakan diterapkan sesuai dengan standar yang berlaku umum dan oleh seluruh wajib pajak. Menurut Wulandari & Sanulika (2024), meskipun adanya sanksi pajak sebagai instrumen untuk mencegah penggelapan pajak, namun tidak sepenuhnya efektif apabila seseorang berada dalam lingkungan yang mentoleransi atau mendukung tindakan tersebut. Hasil penelitian Fitria & Wahyudi (2022), sanksi pajak memengaruhi nyata kepada persepsi penggelapan pajak

Riset ini ialah pengembangan dari riset yang telah dilaksanakan oleh (Rahma et al. 2020). Kebaruan riset ini menggantikan *variable* tarif pajak dengan *variable* machiavellian untuk



mengeksplorasi faktor psikologis dan karakteristik pribadi yang secara khusus memfokuskan kepada mahasiswa akuntansi. Masalah utama dalam penilitian ini ialah bagaimana faktor internal (pemahaman dan kepribadian) dan faktor eksternal (sanksi) membentuk persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak. Berlandaskan ulasan tersebut, tujuan dari riset ini ialah untuk mengujikan serta menganalisis pengaruhnya pemahaman perpajakan, machiavellian, dan sanksi pajak kepada persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak. Riset ini dilaksanakan guna memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, khususnya untuk mendukung pembentukan karakter dan integritas mahasiswa sebagai calon wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

Untuk mengujikan hipotesis yakni faktor independen berimplikasi kepada variabel dependen, riset berikut mempergunakan metodologi kuantitatif. Mahasiswa jurusan Akuntansi dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta menjadi populasi penelitian. Untuk menjamin data relevan dengan tujuan penelitian, pendekatan pengambilan sampel mempergunakan *purposive sampling*, yang dilandaskan kepada kriteria tertentu. Seratus mahasiswa yang aktif mengikuti studi perpajakan dijadikan kriteria.

Pada dasarnya, riset ini bergantung pada informasi yang diperoleh dari wawancara dengan partisipan penelitian. Pendekatan survei dipergunakan untuk mengumpulkan data melalui kuesioner online yang didistribusikan mempergunakan *Google Forms*. Opini mahasiswa terkait pengetahuan pajak, *machiavellianisme*, sanksi pajak, dan penggelapan pajak dinilai mempergunakan skala *Likert* dalam instrumen survei.

Beberapa langkah pengujian statistik dipergunakan untuk menganalisis data mempergunakan SPSS Statistics 25. Penilaian kualitas data dimulai dengan memeriksa instrumen penelitian untuk akurasi dan konsistensi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian heteroskedastisitas, multikolinearitas dengan VIF serta angka Toleransi, serta normalitas *Kolmogorov-Smirnov* membentuk pengujian asumsi klasik, yang merupakan langkah kedua. Terakhir, hipotesis penelitian diuji dengan analisis regresi berganda. Riset berikut mempergunakan formulasi model persamaan regresi berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \quad (1)$$



Untuk mengetahui apakah ada efek parsial yang signifikan, dipergunakan uji t dengan ambang signifikansi ( $\alpha$ ) sejumlah 0,05 atau 5%. Hal ini dilaksanakan untuk mengujikan hipotesis. Untuk wawasan lebih lanjut terkait seberapa baik model menjelaskan fluktuasi variabel dependen, kami menjalankan uji R2.

## HASIL

### Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilaksanakan untuk memberi deskripsi numerik mengenai *variable* penelitian. Berlandaskan data yang diolah dari 100 responden mahasiswa akuntansi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, hasil mengujikan tersebut bisa terlihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman (X1)	Perpajakan	100	1	5	31.5700	2.03631
Machiavellian (X2)		100	1	5	28.7400	3.13540
Sanksi Pajak (X3)		100	1	5	24.6800	2.62090
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)		100	1	5	7.5000	2.87623

Sumber: data SPSS, diolah 2025

Hasil mengujikan mempergunakan statistik deskriptif dijabarkan yakni: *variable* Pemahaman Perpajakan (X1) punya angka rerata sejumlah 31,57 yang lebih tinggi dibandingkan SD sejumlah 2,036, memperlihatkan distribusi data bersifat homogen. *Variable* Machiavellian (X2) memperlihatkan angka rerata sejumlah 28,74 dengan SD sejumlah 3,135, tandanya sebaran data relatif homogen. Kemudian, *variable* Sanksi Pajak (X3) punya angka rerata sejumlah 24,86 dengan SD sejumlah 2,620, juga memperlihatkan tingkat variasi data yang rendah. Sementara itu, *variable* Persepsi Penggelapan Pajak (Y) punya angka rerata terendah sejumlah 7,50 dan SD sejumlah 2,876, namun tetap memperlihatkan distribusi data yang homogen. Secara keseluruhan, nilai SD yang relatif kecil pada setiap *variable* mengindikasikan yakni data terdistribusikan secara merata dan tidak mengalami penyimpangan yang terlalu besar dari angka reratanya.



## Uji Kualitas Data

### Uji Validitas

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	X1.1	0.612	0.196	
	X1.2	0.754	0.196	
	X1.3	0.689	0.196	
	X1.4	0.721	0.196	
	X1.5	0.768	0.196	
	X1.6	0.532	0.196	
	X1.7	0.478	0.196	
	X1.8	0.596	0.196	
Machiavellian (X2)	X2.1	0.701	0.196	
	X2.2	0.765	0.196	
	X2.3	0.682	0.196	
	X2.4	0.673	0.196	
	X2.5	0.734	0.196	
	X2.6	0.589	0.196	
	X2.7	0.62	0.196	
	X2.8	0.512	0.196	
Sanksi Pajak (X3)	X3.1	0.689	0.196	
	X3.2	0.743	0.196	
	X3.3	0.708	0.196	
	X3.4	0.765	0.196	
	X3.5	0.812	0.196	
	X3.6	0.576	0.196	
	X3.7	0.654	0.196	
	X3.8	0.534	0.196	VALID
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	X3.9	0.68	0.196	
	Y.1	0.875	0.196	
	Y.2	0.832	0.196	
	Y.3	0.734	0.196	
	Y.4	0.826	0.196	
	Y.5	0.857	0.196	
	Y.6	0.774	0.196	

Sumber: data SPSS, diolah 2025

Berlandaskan hasil menguji validitas pada tabel 2, keseluruhan indikator dalam riset ini punya nilai koefisien korelasi yang melampaui nilai kritis pada tingkatan sig. 0,05. Perihal ini memperlihatkan setiap indikator yang dipergunakan dalam instrumen penelitian disebut valid serta bisa dipergunakan untuk mengukurkan *variable* yang diselidiki.



## Uji Realibilitas

**Tabel 3. Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X1)	0.901	Andal
Machiavellian (X2)	0.845	Andal
Sanksi Pajak (X3)	0.920	Andal
Persepsi Penggelapan Pajak (Y)	0.882	Andal

Sumber: data SPSS, diolah 2025

Berlandaskan hasil menguji realibilitas yang disajikan dalam tabel 3, nilai *Cronbach's Alpha* untuk setiap *variable* memperlihatkan angka di atas 0,70, memperlihatkan instrumen penelitian punya tingkat konsistensi internal yang baik (Lukman et al., 2023). Dengan demikian, seluruh item dalam kuesioner dapat disebut andal serta layak dipergunakan untuk pengukuran *variable* riset ini.

## Uji Asumsi Klasik

Dengan hasil Asymp. Sig. (2-tailed) sejumlah 0,242, uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk normalitas dilaksanakan. Karena angka ini lebih tinggi dari ambang batas signifikansi 0,05, kita dapat mengatakan yakni data mengikuti distribusi normal. Memverifikasi yakni variabel independen tidak menunjukkan hubungan linier yang kuat ialah tujuan utama dari uji multikolinearitas. Ketiga variabel—Pemahaman Pajak (*VIF* = 1,010), Machiavellian (*VIF* = 1,018), dan Sanksi Pajak (*VIF* = 1,022)—punya angka toleransi melebihi 0,10 serta angka *VIF* lebih rendah dari 10, menurut temuan uji. Hal ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas pada pemodelan regresi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dilaksanakan untuk mengamati apakah varians residual dari observasi yang berbeda pada pemodelan regresi tidak sama. Ketiga variabel terkait pajak—pengetahuan pajak (0,545), Machiavellian (0,109), dan sanksi pajak (0,473)—punya nilai *Sig.* melampaui 0,05 dalam analisis akhir. Akibatnya, heteroskedastisitas tidak terlihat pada model regresi.

## Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Variable	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	-.520			
Pemahaman Perpajakan (X1)	.007	.105	.917	tidak terdugung
Machiavellian (X2)	.064	.917	.362	tidak terdugung
Sanksi Pajak (X3)	.681	8.128	.000	terdugung
			<b>Hasil</b>	<b>Hasil</b>

2556



Variable	B	t hitung	Sig t	Keterangan
R		.650a	F hitung	23.448
R Square (R2)		.423		
Adjusted R Square		.405	Sig. F	.000

Sumber: data SPSS, diolah 2025

Uji t parsial memperlihatkan yakni variabel pengetahuan pajak punya angka sig. 0,917 dan variabel Machiavellian punya angka sig. 0,362, menurut temuan analisis regresi linier berganda pada Tabel 4. Keduanya tidak memiliki dampak substansial terhadap bagaimana masyarakat memandang penggelapan pajak dikarenakan angka sig. melampaui 0,05. Namun demikian, variabel sanksi pajak diasumsikan memiliki dampak positif yang kuat dikarenakan angka t yang dihitung sejumlah 8,128, yang melebihi nilai t tabel 0,196, dan angka sig. 0,000. Selain itu, model regresi sesuai untuk riset ini, karena hasil uji F menunjukkan nilai F sejumlah 23,448 dengan tingkat signifikansi 0,000 (<0,05). Nilai R-squared yang disesuaikan ialah 0,405, menurut temuan uji koefisien determinasi. Berdasarkan analisis ini, variabel eksternal menjelaskan sisa varians dalam pandangan terkait penghindaran pajak, sedangkan variabel independen menjelaskan 40,5%.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Hasil riset ini memperlihatkan yakni pandangan mahasiswa terkait penggelapan pajak tidak terpengaruhi tingkat pengetahuan pajak mereka. Tingkat signifikansi 0,917, yang lebih tinggi dari 0,05, memperkuat hal ini. Temuan ini memperlihatkan yakni opini mahasiswa terkait penggelapan pajak tidak ditentukan oleh pemahaman mereka yang luas terkait aturan, prosedur, dan kewajiban pajak. Beberapa responden mungkin masih beroperasi dari sudut pandang teori akademis dalam hal pajak, daripada keyakinan moral yang mendalam.

Secara teoritis, riset ini mengindikasikan bahwa hanya memiliki pengetahuan kognitif saja tidak cukup untuk membentuk perspektif etis mahasiswa. Dalam konteks pendidikan, pengetahuan yang diperoleh tentang pajak kerap dipersepsikan sebagai gagasan teoritis dan belum diakui sebagai nilai moral atau prinsip komitmen. Wawasan ini bertentangan dengan temuan Sari et al. (2023); Sinaga et al. (2021), yang menyatakan bahwa pemahaman yang kuat tentang perpajakan dapat mengurangi penggelapan pajak

Hasil kajian mencerminkan bahwa pengajaran mengenai kewajiban pajak hendaknya ditunjang dengan pembentukan asas-asas kaidah moral, kejujuran, serta ilustrasi kasus yang



konkret, sehingga mahasiswa tidak terbatas pada pemahaman konsep dasar perpajakan dalam ranah akademik, melainkan mampu mempersepsikan penggelapan pajak sebagai perbuatan yang melanggar norma.

### Pengaruh Machiavellian Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Tingkat signifikansi 0,362, yang melampaui 0,05, memperlihatkan yakni variabel Machiavellian tidak memengaruhi bagaimana penggelapan pajak dipandang Meskipun individu dengan sifat ini cenderung manipulatif dan mengutamakan keuntungan pribadi, namun dalam riset ini karakteristik tersebut tidak memengaruhi cara pandang mereka terhadap legalitas atau etika penggelapan pajak. Temuan riset ini yang menyatakan *variable machiavellian* tidak terdukung menandakan yakni faktor kepribadian pragmatis dan berorientasi diri sendiri bukan pendorong utama persepsi mahasiswa kepada praktik penggelapan pajak. Perihal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh sosial atau tingkat pendidikan di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang mungkin lebih menekankan kepatuhan hukum dibandingkan keuntungan personal.

Temuan ini menyatakan bahwa dampak *variable machiavellian* dipengaruhi oleh kontekstual. Dalam lingkungan akademis, norma sosial, pendidikan etika, dan pentingnya kepatuhan terhadap standar hukum dapat mengurangi dampak machiavellian pada persepsi etis. Temuan ini tidak selaras terhadap teori umum machiavellian maupun penelitian Wardani & Baity (2024) yang menyebutkan individu dengan machiavellian lebih permisif kepada penggelapan pajak.

Perihal ini menyiratkan esensi lingkungan pendidikan sebagai sarana dalam membentuk interpretasi mahasiswa yang berlandaskan nilai, dimana aturan moral maupun prinsip kejujuran yang ditanamkan mampu menetralisasi efek merugikan akibat karakteristik kepribadian yang relevan terhadap pandangan mahasiswa berkenaan dengan penggelapan pajak

### Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Riset berikut membuktikan yakni sanksi pajak memengaruhi positif bersignifikan kepada persepsi penggelapan pajak. Dari angka t hitung sejumlah 8,128 bersignifikansi 0,000, *variable* ini jadi faktor paling dominan dalam riset ini. Temuan ini mempertegas, dimana semakin tegas dan berat sanksi yang diberlakukan, maka persepsi mahasiswa terkait penggelapan pajak diasumsikan sebagai tindakan yang tidak bermoral. Sanksi berfungsi sebagai mekanisme kontrol dalam ketegasan hukum yang menciptakan efek jera dan meningkatkan risiko yang



dirasakan oleh individu, sehingga mereka tidak lagi mengamati penggelapan pajak sebagai tindakan yang dapat dibenarkan.

Temuan ini memperkuat *Theory of Planned Behavior* (TPB), khususnya pada komponen norma subjektif serta persepsi kontrol perilaku. Sanksi pajak dipandang sebagai tekanan eksternal dan faktor penghambat yang kuat bagi niat seseorang untuk melakukan pelanggaran. Hasil riset ini selaras terhadap penelitian Fitria & Wahyudi (2022) mengemukakan yakni individu yang berpersepsi sanksi pajak sebagai alat pencegahan utama akan menjauhi tindakan penggelapan pajak.

Penelitian ini menerangkan bahwa upaya mengoptimalkan edukasi mahasiswa terkait konsekuensi hukum perpajakan adalah hal yang amat krusial. Memaparkan detail yang mudah dipahami mengenai efek ketentuan hukum perpajakan berpotensi memperkuat kesadaran serta mendorong kepercayaan bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang rawan sanksi dan melanggar etika.

## SIMPULAN

Berlandaskan riset ini memperlihatkan hanya sanksi pajak yang terbukti memengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi kepada penggelapan pajak. *Variable* pemahaman perpajakan serta machiavellian ditemukan tidak memengaruhi secara signifikan, tandanya yakni pengetahuan teoritis maupun kepribadian manipulatif tidak cukup kuat untuk membentuk persepsi responden dalam temuan riset ini. Hasil pengujian membuktikann yakni sanksi pajak memengaruhi positif, di mana ketegasan dan beratnya hukuman jadi faktor utama yang menekan sikap toleran kepada praktik penggelapan pajak. Temuan ini membuktikann yakni sanksi pajak sebagai mekanisme pengendalian perilaku yang paling efektif.

Saran dari riset ini, pemerintah dan otoritas pajak disarankan untuk memperkuat penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang konsisten dan transparan guna memperjelas risiko hukum bagi pelanggar pajak. Bagi institusi pendidikan tinggi, disarankan untuk mengintegrasikan nilai etika dan integritas ke dalam kurikulum perpajakan guna membentuk karakter calon wajib pajak yang patuh pajak. Terakhir, peneliti berikutnya direkomendasikan agar meluaskan cakupan penelitian dengan menambah *variable* seperti pengaruh sosial atau tingkat kepatuhan nyata, serta mempergunakan populasi yang lebih luas agar mendapat pemahaman lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. W., Erawati, T., & Dewi, N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(3), 101–113. <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(1), 18–42. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.4>
- Ferdiawan, I. D., Faisol, I. A., & Zuhdi, R. (2023). Pengaruh Gender, Love of Money, Machiavellian, Pemahaman Pajak Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak ( Studi Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan ). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 90–105.
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(01), 58–69.
- Lestari, G. P. L., & Sofie. (2023). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3173–3182. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17761>
- Lukman, Bangun, Y. K., & Philips, M. P. P. F. (2023). The Effect Of Love Of Money, Tax System, And Justice On Tax Evasion. *SIMAK (Sistem Informasi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 21(01), 151–170.
- Rahma, A. A., Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabean (Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen)*, 2(2), 279–295.
- Sari, M. U., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2023). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak ( Tax Evasion )*. 3, 697–708.
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A., Anita, L., & Tanor, O. (2021). Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3).
- Sundari, S. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Self Assessment System terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>



Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money,Machiavelliandan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapanpajak. *Intelektiva*, 04(10), 1–21.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007).

Wardani, D. K., & Baity, H. N. (2024). Pengaruh Ajaran Tamansiswa Tri Nga dan Machiavellian Terhadap Keinginan Mahasiswa Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(03), 899–909.

Wulandari, L. N., & Sanulika, A. (2024). Pengaruh Diskriminasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Serpong. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(1), 72–91. <https://doi.org/10.62237/jna.v1i1.6>

Zainuddin, Z., Mahdi, S. A., & Ismail, A. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 41–64. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6441>